



BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyusunan penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rencana pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketentuan Lampiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

PASAL I


Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 243) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal


BUPATI GUNUNG MAS,
ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,
KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MASINDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

SASARAN STRATEGIS/RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya aksesabilitas dan mutu pendidikan	Angka Melek Huruf	%	$\frac{\sum \text{Penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis}}{\sum \text{Penduduk usia di atas 15 tahun}} \times 100\%$	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	$\frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } i)$	
	Angka Harapan Lama Sekolah	%	$\sum_{i=7}^{13} \frac{\text{Jumlah Penduduk Umur } i \text{ yang bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Umur } i}$	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Gizi buruk	%	$\frac{\sum \text{Balita gizi buruk}}{\sum \text{Balita di Kabupaten Gunung Mas}} \times 100\%$	DINAS KESEHATAN
	Angka kematian ibu	%	$\frac{\sum \text{kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan masa nifas yang dicatat selama 1 tahun}}{100.000 \text{ kelahiran hidup pada tahun yang sama}} \times 100\%$	
	Angka kematian bayi	%	$\frac{\sum \text{penduduk yang berumur kurang dari 1 tahun yang dicatat selama 1 tahun}}{1000 \text{ kelahiran hidup pada tahun yang sama}} \times 100\%$	
	Angka kesakitan	Jumlah	Relevansi diukur berdasarkan masing-masing penyakit	
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Ketersediaan Pangan Utama	%	Ketersediaan Pangan Utama = (Jumlah Ketersediaan Beras hasil Produksi Daerah/ Jumlah Kebutuhan Konsumsi Beras per Kapita per tahun) x 100 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, DAN DINAS PERIKANAN
Meningkatnya PDRB sub sektor perikanan	% PDRB sub sektor perikanan	%	$\frac{\sum \text{PDRB Sub Sektor Perikanan tahun } n - \sum \text{PDRB Sub Sektor Perikanan tahun } (n-1)}{\sum \text{PDRB Sub Sektor Perikanan tahun } (n-1)} \times 100 \%$	
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Jumlah pendapatan perkapita/tahun	Jumlah	$\frac{(\text{Jmlh PDRB sektor Industri}) + (\text{Jmlh PDRB sektor Perdagangan})}{\text{Jmlh Penduduk}}$	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

SASARAN STRATEGIS/RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Jumlah PDRB perkapita/tahun	Jumlah	PDRB ADMD / Jumlah Penduduk	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Angka kemiskinan	Jumlah	$F_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p> $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk. Sumber data : Gunung Mas Dalam Angka - BPS Kab. Gunung Mas. </p>	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Angka Pengangguran	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja / Jumlah seluruh tenaga kerja IPK 2017 Kab.Gunung Mas	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	PDRB sektor Pertanian	%	$G = (PDRB1 - PDRB0) / PDRB0 \times 100 \%$ G = Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM	% koperasi yang modal dan SHU meningkat	%	$\frac{\Sigma \text{Modal} + \text{SHU (sudah RAT)}}{\Sigma \text{Modal} + \text{SHU (belum RAT)}} \times 100 \%$	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	% UMKM yang modal dan omzet meningkat	%	$\frac{\Sigma \text{Modal}}{\Sigma \text{Omzet}} \times 100 \%$	
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Jumlah pendapatan perkapita/tahun	Jumlah	$\frac{(\text{Jmlh PDRB sektor Industri}) + (\text{Jmlh PDRB sektor Perdagangan})}{\text{Jmlh Penduduk}}$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor Industri	%	$\frac{\Sigma \text{Jmlh kontribusi PDRB sektor industri}}{\Sigma \text{Jmlh total PDRB}} \times 100$	
Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	%	$\frac{\Sigma \text{Jmlh kontribusi PDRB sektor perdagangan}}{\Sigma \text{Jmlh total PDRB}} \times 100$	


SASARAN STRATEGIS/RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya kapasitas infrastruktur	ratio jalan dalam kondisi baik	%	$\frac{(\text{Panjang jalan dalam kondisi baik})}{(\text{Panjang jalan Keseluruhan})} \times 100$	DINAS PEKERJAAN UMUM
	ratio jembatan dalam kondisi baik	%	$\frac{(\text{Panjang jembatan dalam kondisi baik})}{(\text{Panjang jembatan Keseluruhan})} \times 100$	
	ratio saluran irigasi yang berfungsi optimal	%	$\frac{(\text{Panjang Saluran Irigasi Di Dalam Kondisi Baik})}{(\text{Panjang Saluran Irigasi Di Keseluruhan})} \times 100$	
Meningkatnya konektivitas	jumlah desa yang terhubung dengan kecamatan	Jumlah	JUMLAH DESA YANG TERHUBUNG DENGAN KECAMATAN / JUMLAH DESA KESELURUHAN	
Meningkatnya layanan konektivitas komunikasi	Jumlah menara telekomunikasi	Jumlah	Σ Menara Telekomunikasi di Kabupaten Gunung Mas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Prosentase penurunan angka/jumlah kecelakaan lalu lintas	%	$\frac{\Sigma \text{Kecelakaan tahun (n-1)} - \Sigma \text{Kecelakaan tahun (n)}}{\Sigma \text{Kecelakaan tahun (n-1)}} \times 100 \%$	DINAS PERHUBUNGAN
meningkatkan sektor pariwisata	% PDRB sektor pariwisata	%	$\frac{\Sigma \text{Pendapatan dari sektor pariwisata}}{\Sigma \text{PDRB Kab. Gunung Mas}} \times 100\%$	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DINAS PEKERJAAN UMUM, SATPOL PP, DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya pelaksanaan RB	Nilai RB	Jumlah	Nilai Evaluasi dalam kurun 1 Tahun	Sekretariat Daerah dan Seluruh Perangkat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai / Kategori	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Gunung Mas oleh Kementerian PAN dan RB	Seluruh Perangkat Daerah
opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK	Opini	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	Seluruh Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen RPJMD, RKPD dan RTRD tata ruang daerah yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan	Jumlah	Dokumen Perencanaan	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas	Nilai/ Level	Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Kapabilitas oleh BPKP	INSPEKTORAT
Meningkatnya maturitas SPIP	Level Maturitas	Nilai/ Level	Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP	Seluruh Perangkat Daerah
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	IKM	IKM	Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik	PERANGKAT DAERAH YG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PELAYANAN MASYARAKAT

SASARAN STRATEGIS/RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
meningkatkan pengusulan penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah pengusulan sertifikat milik Pemerintah Daerah pertahun	Jumlah	Jumlah pengusulan sertifikat milik Pemerintah Daerah pertahun	DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tertatanya pengelolaan administrasi pertanahan bagi masyarakat miskin	Jumlah sertifikat yang diterbitkan pertahun bagi masyarakat miskin tepat waktu	Jumlah	Jumlah sertifikat yang diterbitkan pertahun bagi masyarakat miskin tepat waktu	
Meningkatnya prosedur administrasi pembebasan tanah	% pembebasan tanah yang diselesaikan tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah pembebasan tanah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah tanah yang akan dibebaskan pertahun}} \times 100 \%$	
menurunnya pencemaran lingkungan	% Perusahaan / Wajib Usaha yang menerapkan aturan penanganan limbah	%	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Standar Baku Mutu Air}}{\text{Jumlah Perusahaan yang diawasi}} \times 100 \%$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS KESEHATAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
terpenuhinya baku mutu kualitas air, tanah dan udara	% Standar baku mutu udara	%	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Standar Baku Mutu Udara}}{\text{Jumlah Usaha (Pabrik) yang telah diinventarisir}} \times 100 \%$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda berprestasi	%	$\frac{\sum \text{Organisasi kepemudaan aktif dan mandiri}}{\sum \text{Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina}} \times 100\%$	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Meningkatnya prestasi olah raga	jumlah medali	Jumlah	Jumlah cabang olah raga yang diikuti / jumlah medali yang diperoleh	
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indek pemberdayaan gender (IDG)	skor	$IDG = 1/3 (I_{par} + I_{(DM)} + I_{inc-dis})$	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	%	Jumlah perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar / jumlah perempuan korban kekerasan x 100 %	
	Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	%	Jumlah anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar / jumlah perempuan korban kekerasan x 100 %	
meningkatkan keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Angka kriminal	Jumlah	$\frac{\text{Jumlah Angka Kriminal}}{\text{Kriminal yang terselesaikan}} \times 100\%$	SATPOL PP
	jumlah konflik yang diselesaikan	Konflik	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik yang belum selesai}} \times 100\%$	
	tingkat pelanggaran terhadap Perda	Jumlah	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran terhadap perda}}{\text{Jumlah pelanggaran terhadap perda yang di selesaikan}} \times 100\%$	
Meningkatnya nilai investasi daerah	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Jumlah	$\sum \text{Investor berskala nasional di Kab. Gunung Mas dalam 1 (satu) tahun}$	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, DINAS PEKERJAAN UMUM, BAGIAN HUKUM
	Nilai Investasi Daerah	Rupiah	$\sum \text{Investasi di Kab. Gunung Mas dalam 1 (satu) tahun}$	
Meningkatnya Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani	Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Diselesaikan Tepat waktu	%	$\sum \text{Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani dalam 1 (satu) tahun}$	


SASARAN STRATEGIS/RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
meningkatnya tenaga kerja bergelar S-2, S-3	Jumlah tenaga kerja s-2, s-3	Jiwa	$\frac{\Sigma \text{Jumlah Tenaga Kerja S2 dan S3 (sudah Bekerja)}}{\Sigma \text{Jumlah Seluruh Tenaga Kerja S2 dan S3}} \times 100 \%$	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Meningkatnya aksesabilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar	% jumlah desa yang dialiri air bersih	%	$\frac{\text{Jumlah Desa Rawan Air Bersih}}{(\text{Jumlah Desa Keseluruhan})} \times 100 \%$	DINAS PEKERJAAN UMUM
	% desa yang memiliki perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{(\text{Jumlah Rumah Keseluruhan})} \times 100 \%$	
	% Taman/RTH kota dengan kriteria baik	%	$\frac{\text{Luas Taman RTH Kota dalam Kondisi baik}}{(\text{Luas Taman RTH Kota keseluruhan})} \times 100 \%$	
	% Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Kondisi Baik	%	$\frac{(\text{Jumlah Sarana PJU dalam Kondisi baik})}{(\text{Jumlah PJU Seluruhnya})} \times 100 \%$	
Luas kawasan Tahura yang tertata dan terjaga kelestariannya	Luas kawasan Tahura yang tertata dan terjaga kelestariannya	ha	Luas kawasan Tahura yang tertata dan terjaga kelestariannya	DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN, DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Keterangan :

7 Misi, 39 Sasaran Strategis, dan 55 IKU



 BUPATI GUNUNG MAS,



 ARTON S. DOHONG